

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi Dalam Mitigasi Bencana Banjir

Khalisa Tristani Febria^{1*}, M. Rijal Amirulloh², Dine Meigawati³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sukabumi

e-mail: khalisatristani80@gmail.com^{1*}, mrijalamirulloh@ummi.ac.id²,
dinemeigawati@ummi.ac.id³

Abstrak

Banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang terus berulang di Kota Sukabumi akibat kondisi topografi, curah hujan tinggi, kepadatan permukiman, dan alih fungsi lahan di sekitar aliran sungai. Kondisi ini menempatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi pada posisi strategis dalam melaksanakan mitigasi pada tahap pra-bencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja BPBD Kota Sukabumi dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan utama, informan kunci, dan informan pendukung, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Kinerja dinilai melalui lima dimensi Dwiyanto, yaitu efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPBD Kota Sukabumi, khususnya melalui Program Susur Kampung Berbasis Mitigasi Bencana, telah berjalan cukup baik pada seluruh dimensi tersebut, meskipun keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana masih menjadi kendala. Faktor pendukung utama adalah kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat utama adalah rendahnya kesadaran sebagian warga menjaga kebersihan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sumber daya, edukasi berkelanjutan, dan dukungan pemerintah daerah yang lebih optimal agar pelaksanaan mitigasi bencana banjir dapat berjalan lebih maksimal di masa mendatang.

Kata Kunci: Kinerja Organisasi Publik, Mitigasi Bencana, Banjir, BPBD.

Abstract

Flooding remains a recurring hydrometeorological disaster in Sukabumi City due to its topography, high rainfall intensity, dense settlements, and land-use change around river channels. This situation placed the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sukabumi City in a strategic position to carry out pre-disaster mitigation. This study aimed to analyze the performance of BPBD Sukabumi City in implementing flood mitigation and to identify the factors influencing it. A descriptive qualitative method was used. Data were

collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving a primary informant, a key informant, and supporting informants, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. Performance was assessed through Dwiyanto's five dimensions: effectiveness, efficiency, service quality, responsiveness, and accountability. The findings showed that the performance of BPBD Sukabumi, particularly through the Community Patrol Program for Disaster Mitigation, had run reasonably well across all dimensions, although limited budget, human resources, and facilities remained constraints. The main supporting factor was cross-sector collaboration and community participation, while the main inhibiting factor was low awareness among some residents regarding environmental cleanliness. The study recommends strengthening resources, continuous education, and stronger local government support to optimize flood mitigation performance in the future.

Keywords : Public Organization Performance, Disaster Mitigation, Flooding, BPBD.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis dan iklim yang sangat beragam sehingga rentan terhadap berbagai jenis bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang (Viranti et al., 2025). Curah hujan yang relatif tinggi, ditambah dengan perubahan penggunaan lahan yang masif di berbagai wilayah, menyebabkan potensi terjadinya banjir semakin meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi (Rivaldy et al., 2025). Kondisi tersebut menjadikan banjir sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi hampir setiap tahun dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis (T. Ahmad et al., 2024). Banjir termasuk dalam kategori bencana hidrometeorologi yang memerlukan penanganan terpadu melalui tiga tahapan utama, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana (Yulianto & Wijaya, 2023). Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan dan menuntut peran aktif pemerintah daerah, khususnya pada tahap pra-bencana melalui upaya mitigasi yang terencana dan berkelanjutan.

Dalam perspektif administrasi publik, banjir tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan alam, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola pemerintahan dan kinerja organisasi publik dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat (Delfina et al., 2024). Penanganan banjir yang efektif memerlukan kebijakan, program, dan kinerja lembaga yang bertanggung jawab di bidang kebencanaan, terutama pada tahap mitigasi sebagai langkah preventif sebelum bencana terjadi (Laksana et al., 2024). Oleh karena itu, kajian mengenai kinerja organisasi publik dalam penanggulangan bencana menjadi penting untuk memastikan bahwa upaya perlindungan masyarakat berjalan secara optimal.

Kota Sukabumi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap bencana banjir. Kondisi topografi Kota Sukabumi yang berada pada kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango, intensitas curah hujan yang tinggi, serta kepadatan permukiman menyebabkan sejumlah wilayah mudah mengalami genangan ketika hujan deras (Azhar et al., 2024). Data kejadian banjir yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi menunjukkan bahwa setiap kecamatan memiliki tingkat kejadian banjir yang berbeda-beda, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Kecamatan Terdampak Banjir di Kota Sukabumi

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	Total
1	Baros	4	9	5	27	45
2	Lembursitu	11	7	2	8	28
3	Cibereum	6	8	1	39	54
4	Citamiang	7	1	-	95	103
5	Warudoyong	3	4	1	18	26
6	Gunung Puyuh	5	6	1	27	39
7	Cikole	4	5	3	34	46
Total		40	40	13	248	341

Sumber: BPBD Kota Sukabumi (2024)

Berdasarkan data tersebut, kecamatan seperti Cikole, Warudoyong, Citamiang, dan Gunung Puyuh memiliki frekuensi kejadian banjir yang relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa banjir di Kota Sukabumi cenderung terjadi secara berulang pada wilayah-wilayah tertentu setiap tahunnya, sehingga memerlukan penanganan yang lebih terarah dan berkelanjutan (Fatimah et al., 2024).

Selain faktor curah hujan, kondisi hidrologi wilayah turut memengaruhi terjadinya banjir di Kota Sukabumi (Ichsan & Aulia, 2025). Beberapa wilayah rawan banjir berada di sekitar aliran sungai yang melintasi kawasan permukiman padat penduduk, seperti Sungai Cisuda, Sungai Cipelang, Sungai Cisarua/Cileles, dan Sungai Tipar (Maulana et al., 2026). Sungai-sungai tersebut berpotensi menimbulkan limpasan air ketika debit meningkat, terutama pada saat hujan dengan intensitas tinggi (Haryanti, 2026). Kondisi ini menegaskan bahwa banjir bukan hanya disebabkan oleh faktor cuaca semata, tetapi juga oleh tata ruang wilayah dan pola pengelolaan lingkungan di sekitar aliran sungai.

Dalam upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah, pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai organisasi publik yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Hariadi et al., 2025).

Pembentukan BPBD didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, sementara di tingkat daerah, BPBD Kota Sukabumi menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 157 Tahun 2022 (Budiman et al., 2026). Pada tahap pra-bencana, BPBD memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir, yang meliputi pemetaan wilayah rawan, penyusunan rencana mitigasi, penyebaran informasi kebencanaan, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat (Wekke, 2021).

Meskipun BPBD Kota Sukabumi telah melaksanakan berbagai upaya mitigasi, banjir masih sering terjadi di beberapa wilayah yang sama setiap tahunnya (G. Ahmad, 2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana kinerja BPBD dalam melaksanakan mitigasi bencana banjir, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya di lapangan (Sofyan et al., 2024).

Kajian mengenai kinerja organisasi publik dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Dwiyanto dalam Setiawan et al. (2025), yang menyatakan bahwa kinerja organisasi publik tidak dapat diukur hanya dari sisi internal organisasi, seperti pencapaian target program atau penggunaan sumber daya, tetapi juga harus memperhatikan kepuasan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan public (Setiawan et al., 2025). Dwiyanto merumuskan lima dimensi utama untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas (Salsabila et al., 2026). Kelima dimensi tersebut dipandang relevan untuk digunakan dalam menilai kinerja BPBD Kota Sukabumi karena mampu menggambarkan kinerja organisasi secara komprehensif, baik dari sudut pandang internal organisasi maupun dari perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat program mitigasi (Ashari & Fadli, 2025).

Mitigasi bencana banjir sendiri dapat dipahami sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Haikal et al., 2021). Tahapan mitigasi umumnya mencakup identifikasi dan pemetaan wilayah rawan, penyusunan rencana kontinjensi, sosialisasi dan edukasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, hingga penguatan sistem peringatan dini (Shalih & Nugroho, 2021). Tahapan-tahapan tersebut membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat agar upaya pengurangan risiko dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah rawan bencana (Moroki et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kinerja organisasi publik dalam penanggulangan bencana menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga, ketersediaan sumber daya, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program (Azzahra & Koesyanto, 2023). Sejumlah kajian juga menegaskan bahwa organisasi penanggulangan bencana daerah kerap menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan anggaran, minimnya jumlah personel, serta sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga pelaksanaan program mitigasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah rawan secara merata (Andita, 2026). Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas kinerja BPBD di kota berukuran menengah dengan karakteristik topografi perbukitan seperti Kota Sukabumi masih relatif terbatas, terutama yang menilai kinerja organisasi secara komprehensif melalui kelima dimensi Dwiyanto sekaligus mengaitkannya

dengan program mitigasi berbasis partisipasi masyarakat (Mahsyar et al., 2024). Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, agar dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan mitigasi banjir pada konteks daerah yang spesifik sekaligus melengkapi kekayaan literatur mengenai kinerja organisasi publik kebencanaan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada kinerja BPBD Kota Sukabumi dalam mitigasi bencana banjir, yang dilihat dari aspek pelaksanaan program mitigasi, kesiapsiagaan, dan upaya pengurangan risiko banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja BPBD Kota Sukabumi dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik, khususnya terkait kinerja organisasi publik dalam penanggulangan bencana. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BPBD Kota Sukabumi dalam mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan program mitigasi bencana banjir agar berjalan lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena berdasarkan perspektif para informan secara mendalam, bukan sekadar mengukurnya secara numerik (Nugraha, 2025). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami kondisi di lapangan, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan mitigasi bencana banjir.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder (Amelia et al., 2023). Data primer diperoleh langsung dari informan yang terlibat dalam pelaksanaan program mitigasi banjir, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi BPBD, peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Kombinasi kedua jenis data ini digunakan untuk memperkuat validitas dan kedalaman analisis penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pelaksanaan program mitigasi banjir, kesiapsiagaan BPBD dalam menghadapi potensi banjir, dan upaya pengurangan risiko banjir melalui koordinasi lintas sektor. Informan ditentukan secara purposive berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam kegiatan mitigasi, terdiri dari satu informan utama (Kepala BPBD atau pejabat yang mewakili), satu informan kunci (Operator Pelayanan Operasional), dan dua informan pendukung dari unsur masyarakat wilayah rawan banjir, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan/Peran	Keterangan	Jumlah
1	Informan Utama	Kepala BPBD Kota Sukabumi atau pejabat yang mewakili	Mengetahui kebijakan dan arah strategis mitigasi banjir	1
2	Informan Kunci	Operator Pelayanan Operasional	Mengetahui pelaksanaan di lapangan	1
3	Informan Pendukung	Masyarakat wilayah rawan banjir	Memberikan perspektif penerima manfaat mitigasi	2

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lokasi penelitian, dan dokumentasi berupa laporan kegiatan, data kejadian banjir, serta foto kegiatan (Muslimin et al., 2024). Wawancara disusun secara terbuka dan fleksibel agar informan dapat memberikan informasi secara menyeluruh mengenai program mitigasi, kesiapsiagaan, koordinasi antarinstansi, serta kendala yang dihadapi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut saling melengkapi satu sama lain sehingga data yang diperoleh menjadi lebih valid dan komprehensif. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data untuk menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan, penyajian data secara naratif dan tabulatif untuk melihat pola serta kecenderungan kinerja, dan penarikan kesimpulan disertai verifikasi berkelanjutan terhadap temuan di lapangan. Penelitian dilaksanakan di BPBD Kota Sukabumi pada rentang November 2025 hingga Juni 2026, dengan tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, hingga penyusunan laporan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Struktur organisasi BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang dibantu Sekretariat serta tiga bidang utama, yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unsur yang paling berperan dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir melalui kegiatan pemetaan wilayah rawan, sosialisasi, edukasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Kinerja BPBD Kota Sukabumi dalam mitigasi banjir dianalisis menggunakan lima dimensi Dwiyanto (2008), yaitu efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas (Mahsyar et al., 2024). Ringkasan temuan pada kelima dimensi tersebut disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Ringkasan Kinerja BPBD Kota Sukabumi Berdasarkan Lima Dimensi Dwiyanto

Pada dimensi efektivitas, hasil wawancara dengan informan BPBD menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Susur Kampung Berbasis Mitigasi Bencana telah mencapai tujuannya dalam mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Program ini telah berjalan secara berkelanjutan sejak tahun 2024 hingga 2026 melalui kegiatan susur kampung serta aksi pembersihan saluran air, drainase, dan Sungai.

Informan masyarakat memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa setelah adanya sosialisasi dan kerja bakti bersama BPBD, warga menjadi lebih peduli terhadap kebersihan saluran air dan dampak banjir di lingkungan mereka tidak seberat sebelumnya. Kesamaan pandangan antara BPBD dan masyarakat mengindikasikan bahwa program mitigasi ini telah berjalan efektif, sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2008) bahwa efektivitas organisasi tercermin dari tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Moroki et al., 2025).

Pada dimensi efisiensi, ditemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama, karena jumlah pegawai terus berkurang akibat pensiun sementara beban kegiatan mitigasi bersama masyarakat tetap harus berjalan. BPBD berupaya mengoptimalkan anggaran dan personel yang tersedia agar seluruh program tetap terlaksana, meskipun kendala sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional yang belum memadai dan peralatan yang memerlukan penggantian, masih menjadi hambatan. Masyarakat menilai bahwa kegiatan sosialisasi dan pembersihan saluran air telah dilaksanakan cukup baik meskipun belum menjangkau seluruh wilayah secara merata akibat keterbatasan sumber daya tersebut.

Pada dimensi kualitas pelayanan, BPBD menunjukkan komitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Kegiatan edukasi dan sosialisasi bersama Komunitas Informasi dan Edukasi (KIE) tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan dukungan swadaya masyarakat, sekolah, dan berbagai instansi. Masyarakat menilai petugas BPBD ramah, responsif, dan mampu menjelaskan materi mitigasi dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga kualitas pelayanan dinilai berjalan baik sesuai dengan indikator Dwiyanto mengenai kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.

Pada dimensi responsivitas, BPBD telah membentuk sarana komunikasi berupa grup percakapan yang melibatkan RT, RW, Babinkamtibmas, Babinsa, Kodim, serta unsur BUMN dan BUMD di Kota Sukabumi. Sarana ini berfungsi mempercepat penyampaian informasi kebencanaan dari masyarakat kepada BPBD maupun sebaliknya. Masyarakat menilai BPBD cukup cepat merespons kejadian banjir maupun laporan warga, dan petugas segera berkoordinasi serta datang ke lokasi untuk penanganan sesuai kondisi lapangan. Responsivitas yang baik ini didukung oleh sistem komunikasi yang efektif dan koordinasi lintas unsur, sehingga informasi kebencanaan dapat ditindaklanjuti secara cepat sesuai dengan konsep responsivitas Dwiyanto (2008) yang menekankan kemampuan organisasi mengenali dan merespons kebutuhan masyarakat secara tepat waktu (Maulana et al., 2026).

Pada dimensi akuntabilitas, BPBD melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kemampuan dan sumber daya yang tersedia, meskipun masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran. Evaluasi terhadap setiap kegiatan dilakukan secara berkala, tidak hanya secara internal tetapi juga melibatkan masyarakat dan instansi terkait, dan hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan rencana aksi pada periode berikutnya. Masyarakat mengakui bahwa BPBD memberikan informasi yang cukup jelas mengenai kegiatan mitigasi melalui sosialisasi, media sosial, maupun penyampaian informasi RT dan RW, sehingga akuntabilitas dinilai telah berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, kelima dimensi kinerja tersebut menunjukkan bahwa kinerja BPBD Kota Sukabumi dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir tergolong cukup baik, ditandai dengan kesesuaian antara persepsi BPBD dan masyarakat pada setiap dimensi yang diteliti. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan mitigasi. Faktor pendukung utama adalah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, TNI, BUMN, BUMD, lembaga kemanusiaan, serta partisipasi aktif masyarakat, yang memberikan kontribusi sesuai perannya masing-masing dalam mendukung pelaksanaan mitigasi. Faktor penghambat

meliputi masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, kebiasaan membuang sampah sembarangan, pembangunan di sekitar bantaran sungai yang meningkatkan risiko banjir, serta keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana BPBD.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa kinerja organisasi publik dalam penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada kapasitas internal organisasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi dan kesadaran masyarakat sebagai mitra dalam upaya mitigasi. Kesesuaian antara persepsi BPBD dan masyarakat pada seluruh dimensi kinerja menunjukkan bahwa Program Susur Kampung Berbasis Mitigasi Bencana merupakan strategi yang relevan untuk diperkuat dan direplikasi pada wilayah rawan banjir lainnya di Kota Sukabumi.

Apabila dikaitkan dengan pendekatan Rivaldy et al. (2025) mengenai enam dimensi kinerja organisasi publik, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Sukabumi telah cukup baik pada aspek input dan proses, yaitu memanfaatkan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana yang terbatas secara optimal, serta menjalankan proses mitigasi secara terstruktur melalui koordinasi lintas sektor (Rivaldy et al., 2025). Pada aspek output, program susur kampung dan pembersihan saluran air telah menghasilkan capaian nyata berupa berkurangnya sumbatan drainase di sejumlah wilayah. Pada aspek outcome dan benefit, manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat berupa peningkatan kesadaran lingkungan dan berkurangnya dampak banjir saat hujan deras. Namun demikian, aspek impact atau dampak jangka panjang masih memerlukan penguatan lebih lanjut, mengingat data kejadian banjir pada tahun 2024 justru menunjukkan peningkatan signifikan di sejumlah kecamatan, sehingga keberlanjutan program dan perluasan cakupannya menjadi hal yang perlu terus diperhatikan oleh BPBD ke depan.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu mengenai kinerja organisasi penanggulangan bencana daerah, temuan ini relatif konsisten dalam hal identifikasi kendala struktural berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana sebagai faktor penghambat utama (Salsabila et al., 2026). Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan kekhasan tersendiri, yaitu peran strategis sarana komunikasi lintas unsur berbasis grup percakapan digital yang melibatkan aparat kewilayahan, TNI, dan perusahaan daerah, yang terbukti mampu mempercepat respons BPBD terhadap laporan masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan model responsivitas organisasi penanggulangan bencana berbasis teknologi komunikasi sederhana namun efektif, yang dapat diadaptasi oleh BPBD di daerah lain dengan karakteristik kerawanan banjir yang serupa.

Ke depan, penguatan anggaran, penambahan personel, pemenuhan sarana dan prasarana, serta peningkatan edukasi masyarakat secara berkelanjutan menjadi kunci agar kinerja BPBD dalam mitigasi bencana banjir dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan. Selain itu, replikasi Program Susur Kampung Berbasis Mitigasi Bencana ke wilayah dengan frekuensi banjir tinggi seperti Cikole dan Citamiang perlu menjadi prioritas kebijakan, disertai penguatan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pihak swasta guna mengatasi keterbatasan sumber daya yang masih dihadapi BPBD Kota Sukabumi hingga saat ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi dalam mitigasi bencana banjir menggunakan lima dimensi Dwiyanto, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPBD tergolong cukup baik pada seluruh dimensi yang diteliti. Efektivitas ditunjukkan melalui keberhasilan Program Susur Kampung Berbasis Mitigasi Bencana dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengurangi risiko banjir. Efisiensi telah diupayakan melalui optimalisasi anggaran, sumber daya manusia, serta sarana yang tersedia, meskipun keterbatasan jumlah personel dan fasilitas masih menjadi kendala. Kualitas pelayanan dinilai baik melalui sosialisasi dan edukasi yang konsisten, responsivitas ditunjukkan lewat sistem komunikasi lintas unsur yang cepat, dan akuntabilitas terlihat dari evaluasi program yang dilakukan secara berkala dan transparan.

Faktor pendukung utama kinerja BPBD adalah kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta masih rendahnya kesadaran sebagian warga menjaga lingkungan. Disarankan agar Pemerintah Kota Sukabumi memperkuat dukungan anggaran dan personel bagi BPBD, serta BPBD terus meningkatkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan agar pelaksanaan mitigasi bencana banjir dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan informan dan wilayah kajian agar diperoleh gambaran kinerja organisasi kebencanaan yang lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, G. (2025). Hubungan Sikap, Self Efficacy Dan Sumber Informasi Dengan Kesiapsiagaan Remaja Dalam Menghadapi Bencana Tsunami. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 16(01), 181–190.
- Ahmad, T., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2024). Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Oleh BPBD Kabupaten Pasaman. *Journal Of Social And Policy Issues*, 45–53.
- Amelia, D., Setiaji, B., Primadewi, K., Habibah, U., Lounggina, T., Peny, L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., Setiaji, B., & Dharta, F. Y. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Andita, A. P. (2026). IMPLEMENTASI GOOGLE LOOKER STUDIO UNTUK VISUALISASI BENCANA ALAM DI INDONESIA. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 17(1), 12–19.
- Ashari, M., & Fadli, S. (2025). MANAJEMEN RISIKO ASET TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN ISO 31000: 2018 (STUDI KASUS: BPBD LOMBOK TENGAH). *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains (Jinteks)*, 7(4), 2250–2259.
- Azhar, W. A., Safariyah, E., & Makiyah, A. (2024). Pengaruh Edukasi Kesiapsiagaan Bencana Melalui Metode Video Animasi Terhadap Pengetahuan Siswa. *Journal Of Nursing Practice And Education*, 5(1), 79–85.
- Azzahra, Q. A., & Koesyanto, H. (2023). Efektivitas Tim Reaksi Cepat. *HIGEIA (Journal Of Public Health Research And Development)*, 7(1), 1–11.
- Budiman, H., Khoirunnisa, A., Lisanti, A. Y., Aulia, D. T., & Rahmaniah, N. F. (2026). Kebijakan

- Peraturan Permerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kuningan. *Justicia Journal*, 15(1), 1–10.
- Delfina, N., Mulyadi, A., & Amirulloh, M. R. (2024). IMPLEMENTATION OF DISASTER MANAGEMENT POLICIES AT THE PRE-DISASTER STAGE AT THE REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY (BPBD) OF SUKABUMI CITY. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 22(01), 55–70.
- Fatimah, A., Dewi, M. S., Putri, S. R., & Pramasha, R. R. (2024). Analisis Strategi Pengendalian Banjir Dengan Upaya Konservasi Air Terhadap Sumber Daya Alam (SDA) Di Bandar Lampung. *Indonesian Journal Of Mathematics, Science Dan Education Mathematics, Science*, 2(2), 97–105.
- Haikal, D. F., Hijri, Y. S., & Kamil, M. (2021). Penanggualangan Bencana Melalui Program Sekolah Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(1), 86–108.
- Hariadi, A., Rohayati, Y., & Rudiansah, B. (2025). Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Tata Kelola Dan Kebijakan Publik*, 1(3), 327–355.
- Haryanti, R. N. (2026). STRATEGI BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. *JISIPOI| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1).
- Ichsan, M. N., & Aulia, S. (2025). LITERASI MEDIA DIGITAL SEBAGAI STRATEGI MITIGASI BENCANA PADA LEMBAGA PEMERINTAH MELALUI INSTAGRAM. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisiplin*, 9(5).
- Laksana, T. G., Salsabila, N. M., Adhiya, H., Janah, I. R., Permana, B. W., & Rizki, S. A. (2024). Pemetaan Lokasi Rawan Longsor: Rancangan Sistem Informasi Geografis (GIS) Untuk Mitigasi Di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. *Devotion: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–10.
- Mahsyar, A., Jusman, J., Afdal, A. A. M., & Mahka, M. F. R. (2024). SOSIALISASI KEBIJAKAN KEBENCANAAN BAGI RELAWAN TAGANA DI KABUPATEN GOWA. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 204–211.
- Maulana, Y., Nurhadi, M. P., Athallah, M. F. A., & Herdiyanti, N. (2026). PERAMALAN KEJADIAN BANJIR PROVINSI JAWA BARAT MENGGUNAKAN REGRESI LINEAR BERGANDA DENGAN VARIABEL CURAH HUJAN DAN VOLUME SAMPAH. *Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 10(8), 41–50.
- Moroki, D., Mulyadi, M., & Masi, G. N. M. (2025). Hubungan Pengetahuan Mitigasi Dan Sikap Dengan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Tanah Longsor Pada Masyarakat Di Desa Ritey. *Journal Of Health And Interdisciplinary Perspective*, 1(2), 66–74.
- Muslimin, D., Alamin, Z., Alizunna, D., Nur Ainia, R., Prakoso, F. A., Missouri, R., Masita, Allo, K. P., Nugraha, D., & Dian, H. (2024). *METODOLOGI PENELITIAN: PENDEKATAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN CAMPURAN* (T. P. Wahyuni (Ed.); 1st Ed.). CV LAUK PUYU PRESS.
- Nugraha, D. (2025). *METODOLOGI PENELITIAN : TEORI DAN PRAKTIK* (N. Mayasari (Ed.)).

Penerbit Widina Media Utama.

- Rivaldy, M., Sutisna, S., Putro, R. A. P., & Maarif, S. (2025). MANAJEMEN RISIKO BENCANA BANJIR DI KOTA CIREBON. *Indonesian Journal Of Environment And Disaster*, 4(2), 56–70.
- Salsabila, A., Febrianto, H., & Mariati, H. (2026). Identifikasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan Banjir Di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. *Jurnal Azimut*, 7(2), 130–140.
- Setiawan, D., Sarbini, S., Sriyanto, A., & Rusdiana, J. (2025). Communication Management During Drought Emergency Response: Manajemen Komunikasi Bencana MDMC Sragen Saat Tanggap Darurat Kekeringan. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 121–130.
- Shalih, O., & Nugroho, R. (2021). Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 15(2), 2021.
- Sofyan, T. W., Ni'mah, N. M., & Ragil, C. (2024). Strategi Mitigasi Bencana Longsor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *MATRA*, 5(2), 24–35.
- Viranti, R., Aprillia, B., & Septiansyah, B. (2025). PENGUATAN KAPASITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM KESIAPSIAGAAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Wekke, I. S. (2021). *Mitigasi Bencana*. Penerbit Adab.
- Yulianto, D., & Wijaya, E. S. (2023). Analisa Kajian Risiko Bencana Alam Dan Keterkaitan Kebijakan Pemerintah Serta Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Kegiatan Mitigasi Bencana Di Kabupaten Cirebon. *Proceeding Science And Engineering National Seminar*, 8(1), 107–113.